

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Aksesibilitas atau dalam bahasa Inggris (*accessibility*) yang artinya hal yang mudah dicapai. Pengertian lainnya bahwa aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya (blogspot.co.id, diakses tanggal 14 April 2016). Sejah ini masyarakat hanya mengetahui bahwa kata aksesibilitas hanya berkaitan dengan penyandang cacat. Padahal aksesibilitas itu sendiri bisa juga diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan bagi orang yang berkebutuhan khusus ketika berada di ruang publik. Orang yang berkebutuhan khusus tadi bukan hanya penyandang cacat saja melainkan juga ibu menyusui. Disini ibu menyusui mempunyai hak-hak menggunakan fasilitas khusus ketika berada di ruang publik. Aksesibilitas juga terkait erat dengan ketersediaan dan kemudahan. Jadi, aksesibilitas juga harus difokuskan pada kemudahan bagi ibu menyusui untuk menggunakan fasilitas seperti ruang menyusui guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan ketika berada di ruang publik.

Ruang publik dalam konteks spasial adalah tempat dimana setiap orang mempunyai hak untuk bebas mengakses tanpa harus membayar. Ruang

publik berkaitan dengan semua bagian-bagian dari lingkungan alam dan binaan dimana masyarakat memiliki akses gratis. Ruang publik meliputi : jalan, *square*, tanah perkerasan, ruang terbuka hijau dan taman, dan ruang publik atau privat yang aksesnya tidak dibatasi (Carmona et al, 2004: 10). Pada umumnya ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama, karena ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling berinteraksi dan sering kali timbul berbagai kegiatan bersama. Saat ini ketersediaan ruang publik kota di kota-kota di Indonesia secara umum dapat dikatakan kurang layak secara kualitas. Masih banyak ditemui ruang publik kota yang gagal dalam mengemban fungsinya sebagai ruang utama masyarakat untuk saling berinteraksi dan melaksanakan kegiatan sosial budayanya secara aman dan nyaman terutama bagi ibu menyusui. Aksesibilitas umumnya masih buruk karena tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kemudahan aksesibilitas tersebut. Fasilitas ruang publik yang kurang responsif seperti penyediaan ruang menyusui terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat terutama bagi ibu menyusui merupakan masalah yang harus dihadapi dan segera diselesaikan.

Secara kodrati, menyusui merupakan salah satu bagian dalam siklus hidup bagi perempuan. Air susu diciptakan khusus untuk setiap spesies (*milk is species specific*) memiliki arti bahwa setiap spesies mamalia memproduksi air susu yang khusus (spesifik) sesuai dengan kebutuhan bayi atau anaknya. Tidak seperti bayi spesies yang perlu segera berjalan, bayi manusia perlu

untuk mengembangkan otaknya, dan komposisi ASI-lah yang paling sesuai untuk kebutuhan ini (F.B. Monika, 2014: 16). *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif sekurangnya selama 6 bulan pertama kehidupan dan dilanjutkan dengan makanan pendamping sampai usia 2 tahun, rekomendasi serupa juga oleh *American Academy of Pediatrics* (AAP), *Academy of Breastfeeding Medicine* demikian pula oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) (Suradi,dkk,2010). Menurut UNICEF tahun 2002, dengan memberikan ASI eksklusif dapat secara efektif mencegah kematian anak. Mengingat besarnya manfaat ASI bagi bayi, keluarga, masyarakat, dan negara maka perlu serangkaian upaya yang menjamin bentuk sarana dan prasarana pemberian ASI kepada bayi. Kebutuhan ini dirasakan terutama di ruang umum (publik) dan tempat bekerja untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif. Menurut Direktur Eksekutif UNICEF Anthony Lake tahun 2010, manfaat ASI tidak diragukan sehingga pada kondisi normal, menyusui adalah yang terbaik bagi bayi. Susu ibu adalah makanan terbaik yang dapat diterima seorang bayi dan laktasi memberikan awal terbaik yang paling layak dalam kehidupan seorang bayi.

Cakupan ASI eksklusif selama 6 bulan khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia ini masih rendah. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes 2015 menunjukkan cakupan ASI eksklusif baru sebesar 54,3% dari target 80% (antaranews.com, diakses tanggal 21 Juni 2016). Rendahnya cakupan ASI eksklusif dipengaruhi berbagai macam faktor khususnya faktor intervensi. Faktor intervensi disini meliputi kebijakan

pemerintah, dukungan sosial, dukungan petugas kesehatan, ketersediaan fasilitas menyusui, serta promosi susu formula. Pemerintah telah membuat kebijakan terkait pemberian ASI eksklusif yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 128 dan pasal 129 yang mewajibkan pemerintah pusat, daerah, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat umum untuk mendukung ibu menyusui agar dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sampai bayi berusia 6 bulan. Penyediaan ruang menyusui atau pojok laktasi di tempat umum pada ruang publik sudah menjadi kewajiban terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif yang dimana para pengelola perusahaan, lembaga pemerintah, pusat perbelanjaan dan ruang publik lainnya wajib menyediakan pojok laktasi yang akan memudahkan atau dengan kata lain memberikan kemudahan bagi ibu menyusui dalam pemberian ASI eksklusif kepada bayinya.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan peneliti menemukan 2 keberadaan pojok laktasi yang ada di Kota Pangkalpinang yaitu pojok laktasi yang ada di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Keberadaan pojok laktasi tersebut akan dijadikan peneliti sebagai lokasi penelitian dan selanjutnya akan dijadikan perbandingan dengan keberadaan ruang publik yang tidak menyediakan pojok laktasi. Ditengah tuntutan seorang ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, sudah seharusnya dukungan dan sarana untuk membantu terpenuhinya tuntutan

tersebut harus disediakan, karena ketersediaan akses pojok laktasi tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan program cakupan ASI eksklusif. Untuk itu dalam tulisan ini peneliti mencoba melihat apakah pembangunan dalam konteks aksesibilitas pojok laktasi di Kota Pangkalpinang melalui pelayanan publik sudah dirasakan atau belum oleh masyarakat terutama bagi ibu menyusui. Fenomena inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “Aksesibilitas Pojok Laktasi Bagi Ibu Menyusui Pada Ruang Publik Di Kota Pangkalpinang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aksesibilitas pojok laktasi bagi ibu menyusui pada ruang publik di Kota Pangkalpinang?
2. Faktor apa yang mempengaruhi aksesibilitas pojok laktasi pada ruang publik di Kota Pangkalpinang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seperti apa akses bagi ibu menyusui terhadap pelayanan publik di Kota Pangkalpinang, sudah sesuai atau tidak dalam penyediaannya, apakah sudah sesuai kebutuhan sebagaimana yang telah

diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak bagi ibu dan bayinya dalam kesamaan kesempatan di ruang publik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan dapat bermanfaat secara akademik terutama dalam pengembangan disiplin ilmu khususnya Sosiologi terkait ilmu sosial yang lainnya yang berkaitan dengan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons dalam memetakan secara empiris terkait penyediaan akses pojok laktasi bagi ibu menyusui di Kota Pangkalpinang terhadap fasilitas pelayanan publik.
  - b. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan atau rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas terkait dengan rumusan masalah yang ada diatas.
2. Secara praktis
  - a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif dan pentingnya penyediaan pojok laktasi di ruang publik khususnya di Kota Pangkalpinang.
  - b) Pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang memiliki kekuasaan besar di segala aspek tingkat lokal, diharapkan dengan tulisan ini dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam penetapan kebijakan

khususnya dalam bidang pembangunan yang berkaitan dengan kesetaraan setiap masyarakat yang tergabung dan menikmati pembangunan itu. Pemerintah mampu mengimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap mereka dengan menyediakan fasilitas khusus dalam pelayanan publik khususnya bagi ibu menyusui.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tahap tinjauan pustaka merupakan suatu perbandingan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya, dimana terkait dengan objek formal maupun material, agar dapat menjadi referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini arah penelitian yaitu aksesibilitas bagi ibu menyusui pada ruang publik di Kota Pangkalpinang, bagaimana keberadaan pojok laktasi di Kota Pangkalpinang tersebut serta apa saja kebijakan pemerintah terkait penyediaan pojok laktasi tersebut.

Penelitian yang hampir sama yaitu berjudul *Analisis Dukungan Sosial Terhadap Pemberian ASI Oleh Penyelenggara Tempat Umum Di Balikpapan*. Penelitian ini oleh Eny Mayasari Dewi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang. Objek penelitian yang difokuskan kepada ibu menyusui yang berkunjung ke tempat umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk dukungan sosial yang telah diberikan oleh penyelenggara tempat umum di Balikpapan beserta faktor-faktor yang berkaitan dalam memberikan dukungan terhadap pemberian ASI di Kota Balikpapan.

Aktivitas ibu menyusui di tempat umum belum didukung dengan fasilitas khusus menyusui yang memadai. Sedangkan negara sudah mengatur tentang penyediaan fasilitas menyusui di tempat umum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 dan Permenkes Nomor 15 tahun 2013, dan pemerintah kota melalui dinas kesehatan Kota Balikpapan melalui surat edaran tentang akselerasi peningkatan cakupan program ASI eksklusif di Kota Balikpapan, namun masih banyak ibu menyusui yang mengeluh kurangnya fasilitas menyusui di tempat umum. Mayoritas ibu menyusui yang berkunjung ke pusat perbelanjaan belum pernah menggunakan fasilitas menyusui karena kondisinya kurang baik atau memang tidak disediakan fasilitas tersebut. Kurangnya informasi dan fasilitas menyusui di tempat umum juga dikeluhkan oleh ibu melalui kelompok peduli ASI yang ada di Kota Balikpapan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada 10 orang ibu menyusui yang berkunjung ke tempat umum di Balikpapan, semuanya belum pernah menggunakan fasilitas khusus menyusui di pusat perbelanjaan. Dari kesepuluh ibu menyusui tersebut, hanya 1 orang yang mengaku pernah menemukan ruang menyusui di pusat perbelanjaan, tapi karena tempatnya tidak nyaman jadi ibu lebih memilih menyusui di musholla. 9 ibu lainnya mengaku belum pernah menemukan ruang menyusui sehingga memilih menyusui di ruang ganti pakaian, musholla atau tempat duduk yang sepi, mobil, menggunakan baju menyusui dan jilbab besar sehingga bisa menyusui dimana saja dan membawa ASI perah dalam botol dari rumah. Walaupun

demikian para ibu ini tetap berharap penyelenggara tempat umum lebih memberikan perhatian dan dukungan terhadap pemberian ASI eksklusif.

Setelah dilakukannya tinjauan terhadap penelitian Eny Mayasari Dewi tersebut, terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan pengkajian terhadap ketersediaan fasilitas menyusui yang ada di tempat umum. Perbedaan antara penelitian Eny Mayasari Dewi dengan penelitian ini adalah jika penelitian Eny Mayasari Dewi menunjukkan bentuk dukungan sosial oleh penyelenggara tempat umum di Kota Balikpapan dalam memberikan dukungan terhadap pemberian ASI eksklusif sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan pada ketersediaan aksesibilitas pojok laktasi pada ruang publik di Kota Pangkalpinang serta faktor yang mempengaruhi ketersediaan akses tersebut.

Selain penelitian milik Eny Mayasari Dewi, penelitian lain yang dijadikan sebagai rujukan awal penelitian ini yaitu *Pojok Laktasi Puskesmas Alianyang Kota Pontianak*. Penelitian ini oleh Desca Thea Purnama dan Jamaludin Fisip Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penelitian ini membahas tentang adanya penelitian mengenai rendahnya pencapaian Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif di wilayah cakupan UPK Puskesmas Alianyang serta minimnya tempat atau ruang khusus untuk si ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

Ada beberapa faktor yang selama ini menjadi penghambat pemberian ASI eksklusif kepada sang bayi menurut Ibu Drg. Nuzulisa Zulkifli selaku Kepala UPK Puskesmas Alianyang yaitu kurangnya pengetahuan dan

kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI eksklusif dan masih adanya ibu-ibu terpengaruh oleh iklan promosi sehingga timbul pemahaman bahwa bayi yang minum susu formula lebih sehat dibanding yang minum ASI serta masih adanya ibu-ibu yang berpendapat bahwa dengan memberikan susu formula berarti ia lebih mampu secara finansial. Melihat kegagalan pemberian ASI eksklusif di tahun 2011, inilah yang kemudian menginspirasi Ibu Drg. Nuzulisa Zulkifli selaku Kepala UPK Puskesmas Alianyang untuk memulai kembali meningkatkan pencapaian Inisiasi Menyusui Dini dan pemberian ASI eksklusif dengan sebuah program yang dibuat oleh UPK Puskesmas Alianyang yang bernama pojok laktasi. Pojok laktasi ini merupakan suatu tempat yang posisinya berada di pojok ruangan dan berada dalam satu ruangan imunisasi. Tujuan berdirinya pojok laktasi ini agar ada ruang khusus untuk si ibu dalam memberikan ASI buat si bayi sehingga si ibu merasa leluasa untuk menyusui dan tidak bergabung dengan khalayak ramai.

Kehadiran pojok laktasi ini diharapkan bagi ibu yang menyusui tidak ragu-ragu lagi untuk menyusui anaknya saat sedang diluar rumah. Pojok laktasi juga sebagai pelayanan tambahan yang diberikan oleh UPK Puskesmas Alianyang. Ketika ada pasien yang datang untuk berobat dengan membawa bayinya atau si ibu sedang melakukan imunisasi bayinya dan harus memberikan ASI kepada si bayi, maka si ibu bisa menggunakan pojok laktasi sebagai sarana yang memberikan kenyamanan bagi si ibu untuk memberikan ASI-nya buat si bayi. Pencapaian ASI eksklusif dengan adanya ruang pojok laktasi ini yaitu pada pertengahan tahun 2012 kemarin sudah tercapainya 60%

ASI eksklusif untuk kawasan bina UPK Puskesmas Alianyang dari target SPM Kota sebesar 60%.

Penelitian milik Desca Thea Purnama dan Jamaludin ini sangat membantu peneliti pada tahap untuk memulai melakukan penelitian ini, karena penelitian milik Desca Thea Purnama dan Jamaludin juga membahas mengenai manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya ruang pojok laktasi. Persamaan dengan penelitian ini yakni berusaha mengkaji tentang ruang pojok laktasi dan manfaat yang bisa dirasakan bagi ibu menyusui ketika berada dalam ranah publik. Hanya saja yang menjadi perbedaan penelitian milik Desca Thea Purnama dan Jamaludin dengan penelitian ini yaitu pada fokus permasalahan yang ingin dikaji. Sekalipun sama-sama mengkaji tentang ruang pojok laktasi, tapi penelitian milik Desca Thea Purnama dan Jamaludin fokus mengkaji untuk pencapaian Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif di wilayah cakupan UPK Puskesmas Alianyang, sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan pada ketersediaan aksesibilitas pojok laktasi pada ruang publik di Kota Pangkalpinang serta faktor yang mempengaruhi ketersediaan akses tersebut.

Penelitian lainnya yang juga relevan dengan penelitian ini yaitu *Inisiasi Pojok Laktasi di Terminal Tirtonadi Kota Surakarta*. Penelitian ini oleh Tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan para aktor yang terlibat langsung di dalam pendirian pojok laktasi di Terminal Tirtonadi.

Hasil dari wawancara dengan Djammila, Kepala UPT Terminal Tirtonadi sekaligus inisiator pendirian pojok laktasi di Terminal Tirtonadi yang mengatakan bahwa kebutuhan ibu untuk dapat menyusui bayinya dengan nyaman dan maksimal menjadi motivasi untuk mendirikan pojok laktasi di ruang publik. Inspirasi tersebut muncul dari pengalaman pribadinya saat memantau arus mudik di terminal pada libur lebaran tahun 2010. Djammila prihatin melihat seorang ibu muda yang terburu-buru mengejar bus sembari menyusui bayinya. Maka dari itu, Djammila berusaha menyediakan pojok laktasi untuk menyediakan tempat bagi para ibu menyusui yang singgah di Terminal Tirtonadi. Kehadiran pojok laktasi tersebut sangat menarik untuk dicermati karena merupakan pojok laktasi pertama yang berdiri di terminal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni berusaha mengkaji tentang ruang pojok laktasi dan manfaat yang bisa dirasakan bagi ibu menyusui ketika berada dalam ranah publik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah jika penelitian ini membahas tentang pencapaian Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan hanya memfokuskan pada ketersediaan aksesibilitas pojok laktasi pada ruang publik di Kota Pangkalpinang serta faktor yang mempengaruhi ketersediaan akses tersebut.

Kesimpulan akhir dari semua penelitian tersebut adalah pojok laktasi ini sangat mungkin untuk direplikasikan tidak hanya pada pusat pelayanan

kesehatan tetapi juga pada institusi-institusi baik milik negara maupun swasta. Tidak menutup kemungkinan pojok laktasi ini juga dibangun di tempat umum lainnya seperti pusat perbelanjaan, bandara, dan tempat-tempat umum lainnya sehingga ibu dan bayi mempunyai ruang untuk menyusui dengan aman dan jauh dari keramaian, tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan ASI pada saat di ruang publik dan diharapkan dengan penelitian ini dapat melihat bagaimana ketersediaan akses untuk ibu menyusui ketika berada di ruang publik khususnya di Kota Pangkalpinang.

#### **F. Kerangka Teoretis**

Dalam suatu penelitian kerangka teori merupakan landasan berfikir untuk membahas suatu masalah. Perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran dalam membahas atau mengkaji permasalahan yang dibahas. Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, teori yang digunakan harus relevan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Talcott Parsons yaitu Teori Fungsionalisme Struktural dan teori skema AGIL.

Berbicara mengenai hak dan kesetaraan bagi ibu dan bayinya, maka peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam merealisasikan hal tersebut. Diharapkan sebuah regulasi dari pemerintah dalam mengintervensi semua sistem sosial yang ada pada masyarakat untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan ibu dan bayi di ruang publik yakni melalui pelayanan publik dalam aspek pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dalam hal ini berbentuk

wadah atau sarana untuk melakukan proses interaksi dengan berbagai macam tujuan. Dikaitkan dengan kebutuhan ibu dan bayinya, pembangunan infrastruktur harusnya menyediakan sebuah akses untuk memudahkan mereka dalam pemberian ASI, dan untuk itu pemerintah memiliki kebijakan yang mengatur terkait peraturan pemerintah dan undang-undang tentang ibu dan bayinya. Melihat dari latar belakang serta rumusan masalah yang ada diatas penelitian ini menggunakan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons dalam skema AGIL. Teori Talcott Parsons yang membahas tentang Fungsionalisme Struktural melihat dari permasalahan tentang fungsi sebuah struktur guna menciptakan input-output sebuah kebijakan.

Lahirnya Fungsionalisme Struktural yang didasari dengan adanya anggapan yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat itu sama halnya dengan organisme biologis, dimana ketika sebuah organisme biologis manusia jika salah satunya saja tidak berfungsi maka akan mempengaruhi fungsi dari organisme lainnya (Beilharz, 2005: 294-295). Begitu juga dengan pemikiran Talcott Parsons terkait dengan Struktural Fungsional dalam melihat dari kondisi ini bagaimana sebuah struktur menjalankan fungsinya, terkait dengan fungsi struktur sebagai pemberi layanan kepada masyarakat terutama ibu menyusui. Pemikiran Parsons terkait Fungsionalisme Struktural dalam teorinya ini Fungsionalisme Struktural memberikan tekanan pada suatu tatanan yang teratur dan tidak mengindahkannya adanya konflik yang mengarah kepada ketidakteraturan. Pendekatan Struktural Fungsional beranggapan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sub-sub

sistem yang satu sama lain saling ketergantungan. Oleh karena itu masyarakat merupakan suatu sistem, apabila terjadi perubahan dalam salah satu bagian (sub sistem) maka akan memberi pengaruh kepada yang lainnya.

Dalam konsep A.G.I.L Rocher (Ritzer dan Goodman, 2003: 121) adalah suatu fungsi (*function*) yaitu kumpulan kegiatan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Menggunakan definisi ini Parsons yakin bahwa empat skema ini perlu diterapkan agar struktur dan sistem itu dapat bertahan. Dalam pemahaman terkait skema AGIL dalam Parsons di Strukturalisme Fungsionalnya dapat dipahami sebagai salah satu cara menciptakan kebijakan yang dapat terealisasi dengan kebutuhan masyarakat lewat Adaptasi, yakni bagaimana upaya sebuah kebijakan sebelum dikeluarkan seharusnya beradaptasi dulu dengan kebutuhan di kehidupan masyarakat. Selanjutnya *Goal attainment* atau yang dikenal sebagai tujuan, bagaimana upaya sistem merumuskan kebijakan, mendefinisikan kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian Integrasi atau yang dikenal sebagai penyatuan disini integrasi merupakan upaya penyatuan atau pengaturan menjaga hubungan antara kebijakan sistem dengan masyarakat lewat adaptasi dan *goal attainment* agar membentuk kolerasi antar keduanya. Kemudian yang terakhir penyatuan pola yang dikenal *Latency* sebagai tindakan akhir untuk menjaga pola-pola yang telah berlangsung mulai dari adaptasi, *goal attainment* dan integrasi sehingga terjalin pola berkelanjutan dan masyarakat merasa input yang diciptakan sistem membuahkan output bagi masyarakat lewat kebijakan-kebijakan yang

telah dirancang dan berpihak kepada masyarakat. Begitu juga dengan kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah terhadap ibu menyusui khususnya masalah akses yang perlu diberikan terhadap mereka melalui peraturan perundang-undangan misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sebenarnya apakah peraturan yang telah disusun sudah direalisasikan secara optimal oleh sistem baik itu pemerintah, masyarakat, pengelola pelayanan publik guna menciptakan output yang maksimal serta adil dan berpihak terhadap ibu menyusui. Diharapkan dengan menggunakan analisis Struktural Fungsional mampu untuk memetakan secara empiris terkait penyediaan akses pojok laktasi bagi ibu menyusui di Kota Pangkalpinang terhadap fasilitas pelayanan publik.